

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Komposisi sektor publik berbeda antarnegara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) (Wikipedia, 2019). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada publik/masyarakat. Segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam suatu organisasi sektor publik wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Organisasi pemerintah adalah suatu institusi yang telah diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk pada umumnya untuk mengelola aktivitas pelayanan terhadap seluruh masyarakat, sebagai institusi nirlaba, pemerintah bertujuan bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi tujuannya untuk menyediakan

pelayanan dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjalankan mengurus (eksekutif), mengatur (legislatif), memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya dalam berbagai suatu kejadian atau kondisi pemerintahan, secara baik dan benar.

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Isu tentang kinerja pemerintah daerah ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah.

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode (Bintang Aditama dkk, 2018). Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, kinerja adalah suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan datang, sedang dan telah dilakukan organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi pemerintah daerah penting dilakukan karena berguna sebagai acuan untuk

meningkatkan kinerja organisasi tersebut agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. Harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Bangli.

Kabupaten Bangli adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Fenomena terkait kinerja pemerintah Kabupaten Bangli adalah rendahnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bangli dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di provinsi Bali. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang

dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Berikut tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Menurut Kabupaten Tahun 2015-2020.

Tabel 1.1
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Menurut Kabupaten
Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35	72,36
Kab. Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16	76,17
Kab. Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60
Kab. Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14	77,36
Kab. Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71	71,73
Kab. Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35	69,36
Kab. Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34	67,35
Kab. Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30	72,55
Kota Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68	83,93

Sumber: <https://bali.bps.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten dapat dikatakan rendah, dibandingkan dengan IPM Kabupaten lainnya. Peringkat pertama dengan IPM tertinggi adalah Kabupaten Denpasar, selanjutnya peringkat kedua IPM tertinggi adalah Kabupaten Badung, dan peringkat ketiga IPM tertinggi adalah Kabupaten Gianyar. Sedangkan IPM Kabupaten Bangli menempati peringkat ke 8 dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bangli dinilai kurang maksimal sehingga tujuan dari pemerintah Kabupaten Bangli belum tercapai. Selain IPM yang cukup

rendah anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli cukup rendah dikarenakan menurunnya sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan Pendapatan Asli Daerah ini diakibatkan oleh situasi pandemi covid-19, untuk itu penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangli untuk meningkatkan PAD sebagai sumber-sumber keuangan untuk membiayai-membiayai program/kegiatan pembangunan daerah.

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Pencapaian kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penting bagi organisasi untuk mengetahui apa yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah guna meningkat kinerja mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah antara lain perencanaan anggaran, evaluasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan kompetensi SDM.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah

merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Menurut Halim dan Kusufi dalam Dadan Ramdhani (2017) mendefinisikan anggaran sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut. Perencanaan anggaran yang baik diperlukan untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) alokasi belanja, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting. Berdasarkan hal tersebut semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, maka kinerja pemerintah akan meningkat.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukannya evaluasi untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, yang berguna melakukan untuk perubahan atau perbaikan pada kegiatan berikutnya. Evaluasi anggaran perlu dilakukan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut. Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur

efisiensi serta penilaian terhadap kinerja. Berdasarkan hal tersebut semakin baik evaluasi anggaran yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Julitawati dalam Sri (2017:63) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Faktor keempat yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2017:214). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Sudarsana dalam Sri (2017: 63) belanja modal yang besar

merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah kompetensi SDM. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi SDM dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli?
- 2) Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli?
- 3) Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli?
- 4) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli?
- 5) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa maupun akademisi terkait pengaruh perencanaan anggaran, evaluasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan kompetensi SDM terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangli. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian yang lebih lanjut terhadap obyek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan perencanaan anggaran, evaluasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan kompetensi SDM untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Bangli.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi (Yoyo et.al, 2017:60)

Stewardship Theory, model of man ini didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro-organisational*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan principal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Teori stewardship mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori Teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut dikarenakan steward merasa kepentingan bersama dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi . (Donalson, et al dalam Yoyo, et.al, 2017:54)

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.2 Kinerja Organisasi

Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut Edison (2016:176) “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Sedarmayanti (2018:260) kinerja merupakan hasil kerja seorang, sebuah proses manajemen secara keseluruhan, dimana hasil kerja seorang tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur. Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi.

2.1.3 Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 25 Tahun 2004).

Anggaran adalah sejumlah uang yang tersedia untuk membiayai kegiatan/program dalam periode tertentu. Anggaran dapat dibuat melalui proses penyusunan rancangan keuangan yaitu pemasukan dan pengeluaran, selanjutnya dana tersebut dialokasikan ke setiap kegiatan berdasarkan dengan

fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Pembuatan anggaran sektor publik sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. (Nurkholis, 2019:4).

Anggaran sektor publik sangat penting adanya karena:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena tidak terbatas dan terus berkembangnya kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya.
3. Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merancang tujuan agar sesuai dengan visi dan misi yang ada di lembaga berkaitan, membuat rencana program/kegiatan yang akan dilakukan lembaga dengan maksud mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, memberikan dana untuk program atau kegiatan yang telah disusun.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan peringatan yang dapat mengendalikan penerimaan dan pengeluaran oleh lembaga agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dengan ini maka akan meminimalisir terjadi penggunaan uang negara secara berlebihan.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Untuk menstabilkan roda perekonomian serta menunjang pertumbuhan ekonomi pemerintah menggunakan anggaran sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah.

4. Anggaran sebagai alat politik

Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran akan membuat jatuhnya nilai pemerintah dimasyarakat serta dapat menghilangkan kekuasaan politik yang sebelumnya telah dipegang.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Sebagai alat koordinasi dan komunikasi anggaran membuat seluruh bagian dari bagian terbawah hingga teratas dalam pemerintah harus melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat di dalam anggaran.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Pelaksanaan anggaran oleh lembaga eksekutif akan dinilai oleh lembaga legislatif apakah pelaksanaan berjalan dengan baik atau tidak.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran yang dibuat harusnya dapat menantang atau memiliki tuntutan agar dapat memberikan motivasi kepada penggunaanya bekerja secara baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan dan

tuntutan itu sendiri juga harus dalam hal wajar yang artinya dapat dicapai dan dijalankan oleh pengguna anggaran.

2.1.4 Evaluasi Anggaran

Dalam melakukan sebuah kegiatan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari proses maupun hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan, yang berguna melakukan untuk perubahan atau perbaikan pada kegiatan berikutnya (Salbia dan Risky, 2012). Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat *punitive* maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika evaluasi yang dilakukan bersifat *supportive* akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan kinerja manajemen (Salbia dan Risky 2012). Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran kedepartemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen, dalam pelaksanaan APBD setiap SKPD melakukan evaluasi untuk menilai kinerjanya masing-masing, apakah kinerjanya sesuai yang direncanakan atau sebaliknya untuk itu suatu anggaran harus selalu dievaluasi agar nantinya APBD dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. (Aira, 2012). Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk mempengaruhi

hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan. Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran (Latif, 2014).

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:2). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran dari rumah makan
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. Penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau

hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017:85-88).

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum di tentukan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu

- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan
- 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan
- 7) Retribusi penyedotan kakus
- 8) Retribusi rumah potong hewan
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1): “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.”

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.7 Kompetensi SDM

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berada di dalamnya. Dalam organisasi sektor publik, peran Sumber Daya Manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi Sumber Daya Manusia pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka standar kompetensi karyawan adalah suatu

pernyataan tentang kinerja yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi seorang karyawan sehingga layak disebut kompeten.

Scale dalam Sutrisno (2016:202) mengemukakan kompetensi secara harfiah berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2016:203) mengatakan kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.

Menurut Sutrisno (2016:203) menjelaskan bahwa pengertian kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh ketrampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.

Mulyasa dalam Sutrisno (2016:203) mengemukakan kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun McAshan dalam Sutrisno (2016:203) mengemukakan kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang

yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dari beberapa definisi kompetensi diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki individu yang telah melekat pada perilakunya dalam berbagai keadaan dan tugas pekerjaannya.

Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2016:206) terdapat lima aspek, yaitu:

1. *Motives*, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan memberi tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya.
2. *Traits*, adalah watak orang yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya, percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan.
3. *Self concept*, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang yang dinilai menjadi pemimpin seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinannya sehingga perlu adanya tes tentang leadership ability.

4. *Knowledge*, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
5. *Skill*, adalah kemampuan melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya, seseorang programmer komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan SIM SDM.

Menurut Sutrisno (2016:208) menyatakan bahwa saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia walaupun yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, dan sistem remunerasi. Ruky dalam Sutrisno (2016:208) mengemukakan konsep kompetensi menjadi semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam

mengurangi pengambilan keputusan secara subyektif dalam bidang SDM.

2. Alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.
3. Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi ramping mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga maupun untuk dimobilisasikan secara vertical maupun horisontal.
4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi

memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah ini.

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai dan hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat simpulkan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang berkaitan dengan efektivitas kinerja yang membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi.

a. Jenis-Jenis Kompetensi

Kompetensi dapat dibagi 5 (lima) bagian yakni:

- 1) Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kinerja

- 2) Kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
- 3) Kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri.
- 4) Kompetensi sosial, yakni perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial.
- 5) Kompetensi spiritual, yakni pemahaman, penghayatan serta pengamalan kaidah-kaidah keagamaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Bagian ini memiliki salah satu peranan penting dalam melakukan suatu penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu tidak hanya digunakan untuk memperbandingkan penelitian yang akan dilakukan. Namun hasil penelitian tersebut juga diharapkan akan dapat menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*).

Penelitian yang dilakukan oleh Haslinda (2016) berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Standar Biaya Sebagai Variabel *Moderating* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Wajo dengan menambahkan standar biaya sebagai variabel *moderating*. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran serta standar biaya sebagai variabel

moderating. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Selain itu, dalam pengujian regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa standar biaya berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi dan standar biaya tidak berpengaruh dalam memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini untuk menguji Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. untuk menguji dana perimbangan berpengaruh terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2019) berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Komitmen Terhadap Kinerja Guru Honorer”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan komitmen terhadap kinerja guru honorer. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja,

sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi dan komitmen. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi dan komitmen terhadap kinerja guru.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmari (2017) berjudul “Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan anggaran yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengendalian anggaran kinerja SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018) berjudul “The Effect of Competence and Motivation on Employee Performance Through Employees Capabilities on PT. Binasinar Amity”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara simultan dan parsial. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi dan motivasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil

penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramularso (2018) berjudul “Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan di CV Inaura Anugerah Jakarta. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Djuniar (2018) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan sisa lebih pembiayaan (SILPA) terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal dan sisa lebih pembiayaan (SILPA). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja, dan sisa lebih pembiayaan (SILPA) berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Antari (2018) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan asli daerah dan belanja modal. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2018) berjudul “Pengaruh Kompetensi, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. Pisma Garment Demak Jawa Tengah)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi, kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Pisma Garment Demak Jawa Tengah. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja karyawan, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah kompetensi, kompensasi, dan motivasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja, dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavian (2020) berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel terikat yang digunakan adalah kinerja keuangan, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah pajak daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan retribusi daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja.

